



Journal of Human And Education

Volume 5, No. 1, Tahun 2025, pp 793-801

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Sosialisasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula Tahun 2024

Franciscus Xaverius Wartoyo¹, Yuni Priskila Ginting²

Universitas Pelita Harapan

Email: franciscus.wartoyo@uph.edu, yuni.ginting@uph.edu

Abstrak

Pelaksanaan perhelatan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota sebentar lagi akan dilaksanakan. Tepatnya menurut jadwal perencanaan dari KPU adalah tanggal 27 November 2024 secara serentak yang akan dilaksanakan di TPS-TPS seluruh wilayah dan kabupaten se-Indonesia. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan setiap lima tahun memiliki angka partisipasi hak pilih yang cukup rendah oleh karena itu salah satu tujuan sosialisasi dalam program pengabdian masyarakat ini adalah untuk dapat memberikan informasi dan pemahaman yang cukup komprehensif selain bagi pemilih tetap khususnya bagi pemilih pemula dalam pelaksanaannya di MA Alfalah Buduran Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan konsep sosialisasi online yang telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2024 dalam rangka sosialisasi Pilkada bagi pemilih pemula tahun 2024. Bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, mengenai pentingnya mempersiapkan diri dengan baik, mengikuti semua tahapan, dan menggunakan hak pilih mereka secara bijaksana. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan wawasan teknis, tetapi juga menjadi wadah interaktif, di mana peserta dapat berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait proses pemilihan.

Kata kunci: *Sosialisasi, Pilkada, Pemilih, Pemula, Sidoarjo*

Abstract

The implementation of the election of governors, deputy governors, regents, deputy regents, mayors, and deputy mayors will soon be held. To be precise, according to the planning schedule from the KPU, it is November 27, 2024 simultaneously which will be held at polling stations in all regions and districts throughout Indonesia. The regional head election (Pilkada) which is held every five years has a fairly low voter participation rate, therefore one of the goals of socialization in this community service program is to be able to provide information and understanding that is quite comprehensive, in addition to for permanent voters, especially for novice voters in its implementation at MA Alfalah Buduran Sidoarjo, East Java using the concept of online socialization which has been carried out on October 15, 2024 in the framework of socialization of the Regional Elections for novice voters in 2024. For the public, especially first-time voters, about the importance of preparing well, following all stages, and using their voting rights wisely. This socialization not only provides technical insights, but also becomes an interactive forum, where participants can discuss and ask questions related to the election process..

Keywords: *Socialization, Regional Elections, Voters, Beginners, Sidoarjo*

PENDAHULUAN

Kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu cara dalam melakukan demokrasi. Pemilihan pemimpin daerah ini yang dilaksanakan serentak di setiap wilayah dan daerah merupakan cara yang efektif dalam pelaksanaannya, karena langsung dilaksanakan pada level bawah dimana pemilih benar-benar mengetahui latar belakang yang dipilih dalam hal ini dalam memilih kepala daerah oleh warganya secara langsung di lapangan. Dengan demikian partisipasi warga negara dalam wilayah masing-masing daerah pilihan sangat menentukan pilihan untuk mendapat legitimasi yang kuat. Salah satu proses demokrasi dalam kegiatan yang telah dilaksanakan dalam laporan ini adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pilkada merupakan pelaksanaan kegiatan yang bersifat demokratis guna melakukan pemilihan kepala daerah yang dilakukan setiap lima tahun sekali dan tata pelaksanaannya diatur oleh “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan dari Gubernur”, Bupati, dan Wali Kota beserta wakil-wakilnya. Pada pelaksanaannya Pilkada mulai tahun 2015 dilaksanakan secara serentak meskipun pada awal mula pelaksanaan Pilkada tepatnya tahun 2007 tidak dilaksanakan secara serentak, dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia jumlahnya cukup banyak dengan pemekaran wilayah yang terakhir adalah Papua Barat Daya yang merupakan provinsi ke-38 di Indonesia (Isdarmadji, 2022).

Tujuan utama dilaksanakannya Pilkada secara serentak tidak lepas dari bidang penganggaran dari pemerintah untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan kepala daerah. Selain itu, Pilkada serentak juga bertujuan untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal dengan melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan masa depan daerah masing-masing provinsi di Indonesia (KPU, 2024).

Pilkada sebagai perhelatan politik, sejatinya merupakan sebuah panggung yang mempertunjukkan sebuah dramaturgi. Masalahnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik demokratis tidaklah membutuhkan dramaturgi yang memosisikan mereka hanya sekadar sebagai penonton pasif. Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan hanya dalam kerangka perlakuan diskriminatif pihak penyelenggara, namun juga harus merata dalam memperlakukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (Fadlurrohman, 2017).

Pilkada yang dilaksanakan secara serentak merupakan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara bersamaan dalam wilayah di Indonesia. Sejarah dalam pelaksanaan Pilkada dari waktu ke waktu telah dimulai semenjak tahun 2005. Pilkada 2005, merupakan Pilkada yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005. Pemilihan ini dilaksanakan setelah Undang-Undang no. 32/2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah diundangkan. Pilkada 2005 dapat dikatakan sebagai periode awal dalam memperkuat pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas di daerahnya masing-masing untuk memilih pimpinan di daerah masing-masing. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2007, merupakan pelaksanaan Pilkada kedua namun pada saat itu pelaksanaan ini tidak dilakukan secara serentak seperti pendahulunya. Meskipun tidak dilaksanakan secara serentak, pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2007 masih merupakan peristiwa penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun, pelaksanaan pemilihan pada tahun tersebut masih jauh dari memenuhi kebutuhan dalam mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan.

Pemilihan kepala daerah pada tahun berikutnya, Pilkada 2015 secara serentak digelar untuk kedua kalinya kembali dilakukan di Indonesia. Pemilihan ini melibatkan daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang telah selesai masa jabatannya untuk periode 2015 hingga bulan Juni 2016. Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan dalam Pilkada tahun tersebut menurut informasi Komite Pemilihan Umum (KPU) mencapai 96,9 juta, dimana dalam pelaksanaan pemilihan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Adapun wilayah yang tercakup untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 terdapat di sembilan provinsi dengan jumlah 260 kabupaten dan kota yang melaksanakannya.

Setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 selanjutnya dua tahun kemudian dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang di selenggarakan pada tahun 2017. Pada tahun 2017, pemilihan ini dilaksanakan karena untuk mengganti para kepala daerah yang telah selesai masa jabatannya menjadi kepala daerah untuk masa jabatan periode bulan Juli 2016 hingga bulan Desember 2017. Jumlah peserta pemilihan kepala daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan tersebut telah mencapai 41,2 juta yang mana waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017. Adapun wilayah yang mengikuti pemilihan kepala daerah terdapat sebanyak 7 provinsi dengan 94 kabupaten dan kota turut serta di dalamnya.

Pada pemilihan kepala daerah yang keempat kalinya dilaksanakan pada tahun 2018, atau ketiga kalinya yang serentak (karena tahun 2007 pilkadanya tidak serentak). Pada tahun 2018, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun tersebut dilaksanakan secara serentak untuk mengganti kepala daerah yang telah memiliki akhir masa jabatan pada periode baik tahun 2018 maupun tahun 2019. Banyaknya peserta yang mengikuti pemilihan kepala daerah tahun tersebut mencapai sebanyak 152 juta. Pemilihan kepala daerah saat itu digelar secara serentak meliputi 17 provinsi dan 154 kabupaten dan kota yang dilaksanakan tepat pada tanggal 27 Juni 2018. Sedangkan pada tahun 2020, diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang diikuti 9 provinsi dan 261 kabupaten dan kota dengan jumlah pemilih mencapai sebanyak 100,3 juta pemilih.

Khusus pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun berikutnya yaitu pada tahun 2024 yang akan datang tepatnya akan di jadwalkan pada 27 November 2024 akan dilaksanakan secara serentak yang meliputi lebih dari 200 daerah di wilayah negara republik Indonesia untuk memilih kepala daerah baru periode berikutnya yang menggantikan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya untuk periode 2024 saat ini. Sehingga dengan demikian pastinya jumlah pemilih juga akan lebih besar dan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pemilih pemula untuk Pilkada tahun 2024 diperkirakan akan mencapai lebih dari 24 pemilih pemula usia 17 - 25 tahun (KemenPPPA, 2024).

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim dari universitas pelita harapan kali ini memilih provinsi Jawa Timur, mengapa? Karena Jawa Timur, merupakan satu dari banyak provinsi di seluruh wilayah Indonesia, dan juga bagian provinsi yang ada di Pulau Jawa, maka potensi pemilih diperkirakan sebesar 16% khusus dari Jawa Timur saja, dari total pemilih di Indonesia. Potensi ini memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak pengamat khususnya pemerintahan karena penyelenggaraannya hampir berbarengan dengan pemilihan umum untuk presiden. Fenomena ini dijelaskan oleh salah satu surat kabar elektronik terkemuka di Jakarta bahwa merujuk dari hasil pemilihan presiden sejak tahun 2004 hingga tahun 2019, hampir bisa dipastikan bahwa provinsi Jawa Timur memiliki keunggulan dari salah satu kemenangan pemilihan presiden berdasarkan jumlah pasangan calon wakil dari Jawa Timur (Indikator.com, 2024).

Menurut hasil riset Indikator (2024), tersebut mengungkap anggapan anak muda bahwa politisi dan partai politik tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Hal ini dapat berpotensi untuk menurunkan gairah dan minat pemilih pemula mengikuti pesta demokrasi. Saat ini, masih minimnya pengetahuan komprehensif remaja dan anak muda, termasuk para pemilih pemula tentang kehidupan bernegara, haknya sebagai warga negara, serta manfaat politik, demokrasi dan pemilu membuat mereka kurang tertarik dengan pemilu. Untuk itu, perlu dilakukan upaya khusus untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi anak-anak muda dalam proses demokrasi.

Sehubungan pelaksanaan pilkada serentak dan pembinaan bagi pemilih pemula, maka dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Pelita Harapan adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dengan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait kegiatan Pilkada 2024 di lapangan juga memberikan pemahaman sesuai tujuan pemilihan Pilkada tersebut yaitu meningkatkan kekuatan pelaksanaan demokrasi pada level wilayah/daerah melalui keterlibatan secara langsung partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi pemilih pemula pada siswa di MA Alfalah Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini ditujukan pada seluruh siswa di SMA Unggulan Al Falah Buduran yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2024 Pukul 10:00 – 11:30 WIB yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep sosialisasi online. Pendekatan sosiologis dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dengan telaah utamanya adalah hakikat masyarakat dan hubungan sosial. “Sosialisasi digunakan oleh sosiolog ketika mempelajari sifat tatanan sosial, pertumbuhan organisasi sosial, pembentukan identitas pribadi, dan mekanisme kontrol dan penyimpangan sosial” (Poulus, 2018). Penggunaan pendekatan secara konseptual dilakukan guna memberikan pandangan yang lebih analitis dalam isu pemilihan calon kepala daerah tentang nilai-nilai nasional yang dapat mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Secara menyeluruh, kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang mencakup proses umum di mana perorangan mendapatkan skill atau keahlian untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sosialisasi adalah cara yang membantu dalam memahami bagaimana individu, dari sudut pandang sosial, dapat berhasil berkolaborasi dan berintegrasi menurut tuntutan kehidupan sosial. Pada kasus ini adalah tuntutan agar mereka mampu bersosialisasi dan berintegrasi serta menggunakan hak pilihnya dengan memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten di Indonesia. Pilkada 2024 merupakan proses demokrasi di Indonesia dalam memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota untuk masa bakti 2024–2029. Pilkada 2024 sedianya direncanakan akan berlangsung pada tanggal 27 November tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian saat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, serta pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu sangat krusial untuk menentukan

masa depan daerah. “Partisipasi aktif masyarakat, terutama pemilih pemula, sangat penting dalam menentukan masa depan daerah masing-masing”.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bersama tim dari Universitas Pelita Harapan Jakarta (UPH) di MA Al Falah Buduran, Sidoarjo dengan konsep sosialisasi online melalui media online zoom. Pemaparan utama dalam sosialisasi ini disampaikan oleh tim langsung kepada seluruh siswa dimana mereka sebagian besar merupakan pemilih pemula.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut tim memberikan pengarahan dan informasi terperinci mengenai berbagai tahapan penting dalam pemilu, sebagaimana halnya lama waktu kampanye atau kapan kampanye akan dilakukan, saat waktu pemungutan suara, sampai pada proses perhitungan dan pengumuman hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, tim juga menjelaskan tata cara pencoblosan yang sah, prosedur pengawasan, dan peran masyarakat dalam menjaga keamanan serta netralitas selama pemilu berlangsung.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula di MA Al-Falah Buduran, Sidoarjo dalam konsep Sosial Online melalui media online zoom.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di MA Al Falah Buduran Sidoarjo pada kegiatan saat sekarang memiliki tujuan dalam memberikan edukasi kepada para siswa dimana dengan proses pembelajaran yang sangat panjang akan memberikan peningkatan kualitas perpolitikan sebuah bangsa. Oleh karena itu, kegiatan pelaksanaan pengajaran yang dilakukan perlu dimulai sejak awal sesuai dengan tahapan perkembangan dan kecerdasan anak, sehingga anak-anak tumbuh dengan perspektif positif tentang politik dan berkontribusi menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik, sebagai bagian dalam proses menciptakan Generasi emas 2045.

Para siswa diberikan pengertian bahwa untuk mencapai pemilu yang berkualitas, penting bagi setiap warga negara untuk memahami hak pilih dan dipilih sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan. Hak pilih adalah hak dasar setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum (Nuraisyah et al., 2024). Dalam konteks pemilu, hak pilih memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menentukan perwakilan politik mereka melalui suara mereka. Hak ini merupakan salah satu bentuk ekspresi demokrasi, di mana setiap suara memiliki nilai yang sama dan berkontribusi dalam membentuk keputusan politik yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Memahami hak pilih adalah langkah awal yang penting dalam menghargai dan menjalankan kewarganegaraan yang bertanggung jawab (Fahmi, 2017).

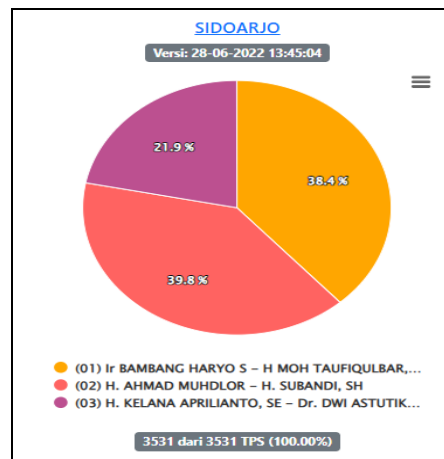
Edukasi tentang mengetahui informasi calon yang akan dipilih, siapa dan latar belakang apa sehingga pemilih dapat yakin dengan calon pilihannya serta informasi lain terkait calon pilihannya dan bagaimana seharusnya dilakukan saat dibilik pencoblosan agar dapat mencoblos dengan baik dan benar sehingga menghindari kesalahan saat mencoblos serta hal-hal lain prosedur pemilihan kepala daerah. Selain itu juga siswa diberikan pengertian bahwa meskipun pilihannya berbeda-beda untuk tetap saling menjaga persatuan dan kesatuan.

Materi selanjutnya yang disampaikan saat itu adalah pencalonan bupati dan wakil bupati kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan ketentuan “Pasal 123 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota” sebagaimana diubah dengan “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota” serta “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024”, bersama ini diumumkan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut;



Gambar 2. Sosialisasi Pilkada 2024 Bupati/Walikota Sidoarjo

Data Pemilih Pilkada 2024 yang terdiri dari Data Pemilih Tetap (DPT) dan Data Pemilih Sementara (DPS) ini tengah dilakukan proses ccklit oleh Pantarlih secara berkala akan disinkronisasikan. Status data Pemilih dapat dicek melalui situs resmi Cek DPT Online KPU. Proses pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah secara serentak memiliki potensi untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Warga yang memiliki hak pilih tidak perlu berkali-kali datang, dan hanya perlu datang ke TPS satu kali untuk dua pemilihan, untuk dapat menghemat waktu dan energinya. Menimbang luasnya dalam keterlibatan pemilihan di setiap wilayah juga dapat meningkatkan perhatian setiap lapisan masyarakat. Kampanye dan sosialisasi yang lebih terpadu memiliki potensi untuk dapat meningkatkan kesadaran politik bagi warga negara khususnya yang memiliki hak memilih dan dipilih. Selain hal yang telah disebutkan, pengurangan frekuensi pelaksanaan pemilihan kepala daerah memiliki harapan yang tinggi untuk dapat mengurangi rasa kebosanan pemilih karena pelaksanaan pemilihan yang berkali-kali dilakukan dengan wilayah yang terpisah-pisah.



Gambar 3. Jumlah pemilih total secara keseluruhan Pilkada 2020 kabupaten Sidoarjo

Sumber: (Info Publik Pilkada 2020, 2024)

Menurut tribunjatim (2024), KPU Sidoarjo sudah menetapkan 1.481.547 orang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo 2024. Dari jumlah itu, diketahui ada sebanyak 29.046 warga yang berstatus pemilih pemula. Artinya, mereka yang baru pertama menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo pada november nanti. Jumlah tersebut dengan tingkat partisipasi pada tahun-tahun sebelumnya pada Pemilihan Presiden (tahun 2018) terungkap sebesar 64% artinya di kabupaten Sidoarjo sendiri untuk Pilkada dapat dipastikan terdapat peningkatan jumlah pemilih pemula yang cukup banyak (antaranews.com, 2018).

Dengan demikian pelaksanaan kegiatan sosialisasi online yang dilaksanakan oleh tim UPH ini memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat khususnya siswa di MA Alfalah Buduran Sidoarjo Jawa Timur, dalam Pilkada sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, digunakan sebagai salah satu cara menentukan pemimpin di wilayah kota/kabupaten di Indonesia secara adil dan demokratis.

Sebagai warga negara tentunya diharapkan dapat ikut serta menyalurkan hak suara untuk dapat bersama-sama menentukan pemimpinnya. Oleh karena itu, penting untuk diketahui mengapa kita harus terlibat aktif dalam proses pemilihan umum baik itu Pemilu maupun Pilkada (Aziza, 2016).

Kendati memang memilih adalah sebuah hak perlu ditegaskan bahwa warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut menentukan arah dan masa depan bagi pemimpinnya. Dengan menentukan pilihan dan menggunakan hak suara, maka artinya seorang warga negara turut telah berkontribusi dalam memilih pemimpin yang akan mengurus dan membawa arah masa depan bangsa. Hal itu menjadi wujud tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan. Karena apabila tidak melakukan haknya sebagai pemilih, warga negara yang berhak memilih tapi tidak menggunakannya adalah kemungkinan terpilihnya pemimpin berkualitas buruk. Hal tersebut dapat dimungkinkan terpilihnya seorang pemimpin berdasarkan pragmatisme politik, salah satunya melalui money politic. Hal itu membuat tidak terpilihnya pemimpin yang berkualitas.

Tidak menggunakan hak suara juga dapat menimbulkan potensi kecurangan dalam proses pemilihan pemimpinnya seperti pada pelaksanaan Pilkada (Fahmi, 2017). Saat seorang pemilih tidak menggunakan hak pilih, tersisa satu surat suara yang tidak terpakai. Maka, suara yang tidak digunakan ini membuka potensi manipulasi suara oleh oknum yang mungkin melakukan kecurangan. Oleh karena itu, penting untuk menentukan pilihan dan menggunakan hak pilih dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan menggunakan hak pilihnya, maka warga negara tersebut telah mampu membantu mengurangi potensi kecurangan dalam Pilkada.

Berikut tips menjadi pemilih cerdas; Pertama, telusuri rekam jejak para calon. Untuk menjadi pemilih cerdas, dapat dicari informasi para kandidat sebagai gambaran dan pertimbangan untuk memilih. Informasi yang perlu dicari dari setiap kandidat yaitu terkait kinerja, visi-misi, etika dan moral. Kedua, hindari hoax. Temukan berbagai informasi pemilu dengan akurat. Pemilih cerdas harus bisa memastikan lebih dahulu kebenaran informasi yang didapatkan seputar Pilkada sehingga tidak termakan berita bohong. Salah satu caranya mengambil informasi dari sumber resmi dan terpercaya. Ketiga, ketahui tata cara pemilihan. Pemilih cerdas akan mencari tahu syarat dan tata cara pemilihan agar tidak ada suara yang terbuang sia-sia hanya karena kesalahan dalam proses pencoblosan. Keempat, mengawasi seluruh proses tahapan Pilkada. Sebagai pemilih cerdas, tidak hanya berhenti sampai pada tahap menggunakan hak suara, tapi juga terlibat secara aktif dalam mengawasi dan memantau seluruh tahapan pemilihan. Proses pengawasan tersebut dilakukan untuk mengatasi kerawanan seperti kecurangan dalam proses perhitungan suara (Sulastri, 2024).

SIMPULAN

Bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, mengenai pentingnya mempersiapkan diri dengan baik, mengikuti semua tahapan, dan menggunakan hak pilih mereka secara bijaksana. Hak pilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang setara dalam sistem hukum dan sistem pemerintahan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian jaminan dalam melaksanakan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih telah diatur undang-undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Sosialisasi ini tidak hanya memberikan wawasan teknis, tetapi juga menjadi wadah interaktif, di mana peserta dapat berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait proses pemilihan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian saat ini memiliki tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan Langkah demi Langkah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024 kepada seluruh peserta. Pelaksanaan pengabdian juga melakukan sosialisasi yang memiliki harapan untuk dapat meningkatkan peran warga sebagai partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak.

Telah dijelaskan oleh tim sosialisasi termasuk peraturan dan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan, metode dan tata cara berkampanye yang sehat dan bersih, serta pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. Pembahasan dan dialog dalam berdiskusi juga dilaksanakan yang menjadi bagian terpenting pelaksanaan pengabdian saat ini, serta memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengklarifikasi berbagai isu yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024.

Semua pihak yang terlibat, dengan adanya pelaksanaan kegiatan saat ini, diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Oleh karena itu diharapkan bagi seluruh warga dapat melaksanakan program ini secara aktif dan berpartisipasi untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, demi masa depan yang lebih baik.

SARAN

Melalui kegiatan ini, diharapkan bagi siswa khususnya yang pada saat Pilkada 2024 bulan November 2024 baru pertama kali sebagai peserta pemilihan gubernur/bupati, dan

walikota diharapkan semakin siap menyongsong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024. Partisipasi aktif dan kesadaran akan hak serta tanggung jawab sebagai pemilih menjadi kunci suksesnya pemilu yang demokratis, aman, dan damai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberi dukungan terhadap pelaksanaan pengabdian ini. Pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim sosialisasi Pilkada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dan peserta sosialisasi MA Al Falah Buduran Sidoarjo Jatim.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews.com. (2018, June 29). *Partisipasi pemilih di Sidoarjo 64 persen*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/722612/partisipasi-pemilih-di-sidoarjo-64-persen>
- Aziza, A. D. (2016). Rekrutmen Dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Di Samarinda Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1489–1498. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Anindyka%20Dwi%20Aziza%20\(10-21-16-10-18-11\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Anindyka%20Dwi%20Aziza%20(10-21-16-10-18-11).pdf)
- Fadlurrohman, A. Z. (2017). Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur. *Jurnal Transformative*, 3(2), Article 2. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/124>
- Fahmi, K. (2017). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk1443>
- Indikator.com, Indikator. com. (2024). *Rilis Survei Jawa Timur 01 Oktober 2023*. <https://indikator.co.id/rilis-survei-jawa-timur-01-oktober-2023/>
- Info Publik Pilkada 2020*. (2024). <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/35>
- Isdarmadji, N. Q. (2022, December 9). *Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/provinsi-papua-barat-daya-diresmikan-indonesia-sekarang-miliki-38-provinsi>
- KemenPPPA, K. (2024). *Menteri PPPA Ajak Pemilih Pemula jadi Pemilih yang Cerdas pada Pemilu 2024*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA1Nw==>
- Nuraisyah, R. A., Susanti, E., Puteri, F. A., Pratama, D. M., Setiawati, E., & Pratama, R. I. S. (2024). Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 822–831. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2659>
- Sulastri, E. (2024). *Cari Tahu Pentingnya Menggunakan Hak Suara*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini-1/cari-tahu-pentingnya-menggunakan-hak-suara/>